

Tinjauan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur) secara langsung menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

Luhur Kurnianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20200337&lokasi=lokal>

Abstrak

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedaulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya. Hal tersebut konsekuen dengan ciri-ciri negara kesatuan yang pemerintahannya sebagai pengembalian kedaulatan absolut negara. Lebih lanjut, pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat dan dijalankan berdasarkan konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintahan Negara Republik Indonesia harus senantiasa menerapkan sistem demokrasi pada lapangan pemerintahan mana pun. Dikaitkan dengan Pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Masing-masing daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri, dan masing-masing daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Selaras dengan ketentuan dalam konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 24 Ayat (5) mengatur cara pengisian Kepala Daerah yang dipilih secara langsung. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan otonomi daerah. Hubungan antara susunan negara kesatuan, otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem demokrasi seperti Indonesia adalah fokus bahasan yang akan dianalisis dalam penulisan skripsi ini.

.....Article 1 Paragraph 1 of The Constitution 1945, determines that Indonesia is a unitary state with a structure of unitary and form of republic. According to C.F. Strong, the central government of the unitary state holds the internal and external sovereignty absolutely and does not admit of an additional sovereign organ within the government. The unitary state itself has a basic characteristic which is centralistic in the terms of its government. This is consistent with the characteristic features of the unitary state which is the central government as the bearers of absolute state sovereignty. Furthermore, Article 1 Paragraph 2 of The Constitution 1945 asserted that state sovereignty comes from citizens and operated according to the constitution. Departing from this requirement, the government of Indonesia has to apply the democratic system in any government field. Associated with Article 18 of the Constitution 1945 that the Republic of Indonesia is divided into provinces and provinces are divided into districts and municipal areas. In accordance with the requirement in the constitution, Act Number 32 of 2004 on Local Government, on Article 24 Paragraph 5 regulates the position and the way of directly elected regional head. In the Act Number 32 of 2004 stipulates regarding the implementation of local government which is based on local autonomy principles. The relation between unitary state structure, local autonomy, and direct local election in the state governing democracies like Indonesia is a discussion that will be analyzed in this thesis.